

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH; SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI PEMEDIASI

Annie Mustika Putri, Kirmizi dan Yesi Mutia Basri

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

This research aims to test the influence of directly and indirectly the independent variables of the application of the system financial accounting areas, application of government accounting standards, competencies of human resources, dependent variable quality of local government financial reports with variable mediation internal control system the government. The data used in this research is the primary data that comes from the dissemination of questionnaires to officials administering finance in a work unit (SKPD) area of the device in the city of Pekanbaru, Kampar and Rokan Hilir. The SEM analysis approach through partial least square (PLS). The results showed that implementation of the Government's accounting standards, and the competence of the human resources of the positive and significant effect, either directly or indirectly to the quality of the financial report of local government through the intervening variables, the system internal control of the Government. While the variable the application of the system financial accounting areas does not affect the of the financial reports of local government.

Kata Kunci : the application of the system financial accounting areas, application of government accounting standards, Competence of Human Resource, quality of Local Government Finance Report, Implementation of Government Internal Control

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut (Ardeno Kurniawan, 2013). Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat (Ardeno Kurniawan, 2013). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010:9). Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Erlina Rasdianto, 2013:23).

Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, dimana ada 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkan hasil pemeriksaan WDP dari BPK pada tahun 2015 yaitu; Pekanbaru, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Dumai. Tapi disini peneliti mengambil populasi yaitu 3 besar kabupaten/Kota dengan APBD terbesar. Adapun 3 Kabupaten/Kota dengan APBD terbesar untuk tahun 2015 yaitu Pekanbaru, Rokan Hilir, dan Kampar. Karena, dengan mengelola dana yang lebih besar, tentu akan lebih besar juga resiko dalam penggunaan dana APBD tersebut. Jadi bagaimana SKPD pada Kabupaten/Kota dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Opini WDP ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta mengindikasikan bahwa masih banyak kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang perlu diperbaiki (Indriasih, 2014). Tentu saja dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (Bahrullah Akbar, 2015 dalam BPK RI, 2015).

Hasil penelitian Harken Drama (2014), mengindikasikan bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Solok. Apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) mengemukakan bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia (Kawedar, 2010; Susilawati dan Riana, 2013). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja.

SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Sudarmanto, 2009:76). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Ruki, 2003:106; Sudarmanto, 2009:76) SDM yang bersangkutan. SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Simanjuntak (2005:72) bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan.

Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Arens et al, 2008:290; Susilawati dan Riana, 2013). Chambers dan Payne (2009) membuktikan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan (Sukmaningrum, 2011). Sudirianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi SPIP yang dilaksanakan, maka kecendungan kualitas LKPD yang dihasilkan PPK akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris: Untuk menguji dan menganalisis pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKPD. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAKD terhadap Kualitas LKPD. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAKD terhadap SPIP.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAP terhadap SPIP. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap SPIP. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAKD terhadap Kualitas LKPD melalui SPIP. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD melalui SPIP. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD melalui SPIP.

Laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan daerah adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 1992:17).

Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Arens et al, 2008:290; Susilawati dan Riana, 2013). Chambers dan Payne (2009) membuktikan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan (Sukmaningrum, 2011). Sudirianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi SPIP yang dilaksanakan, maka kecenderungan kualitas LKPD yang dihasilkan PPK akan semakin baik.

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Jadi, apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

H2a: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Widyaningsih dan Triantoro (2011) menyebutkan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan penerapan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Tingkat efektifitas penerapan sistem akuntansi dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern dengan baik. Tingkat penerapan sistem akuntansi dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern dengan baik.

H2b: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Harken Drama (2014) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011:271). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia. Penerapan SAP berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

H3a: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan SPI yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya penerapan pada standar akuntansi pemerintah, tentu juga harus didukung oleh sistem pengendalian intern didalam penyelenggaraan keuangan.

H3b: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan adanya penerapan SAP yang ditunjang atau diikuti oleh sistem pengendalian intern pemerintah didalam suatu organisasi, tentu akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

H6: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimediasi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Secara umum, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi, dapat diartikan apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H4a: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akhmad Syarifudin (2014) menunjukkan bahwa hubungan kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penerapan SPIP. Artinya semakin tinggi variasi kompetensi SDM maka pengendalian internal pemerintah akan semakin efektif. Dengan demikian kompetensi aparatur sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan ketaatan terhadap aturan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

H4b: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kompetensi SDM yang tinggi dalam menerapkan SPIP secara optimal, akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. SPIP yang dijalankan oleh PPK-SKPD yang memiliki kompetensi mampu menghasilkan LKPD yang memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. (Sudirianti, 2015).

H7: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimediasi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**METODE PENELITIAN**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada PPK-SKPD Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hilir. Seluruh PPK-SKPD dilingkungan SKPD pemerintah daerah kota pekanbaru, kabupaten kampar, dan kabupaten rokan hilir yang berjumlah 96 sampel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden dan kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan software *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghozali (2008) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. Sem yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*.

Pada Outer Model atau Measurement Model ini akan menjelaskan tiga komponen penting dalam menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel lainnya. Tiga komponen tersebut adalah *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-rata	Deviasi Standar
Kualitas LKPD	16-80	42-80	64.08333	8.388472
Penerepan SAKD	8-40	18-40	32.82143	4.884598
Penerapan SAP	31-155	92-151	130.8333	13.15417
Kompetensi SDM	20-100	65-100	86.41666	8.529478
SPIP	22-110	48-102	78.71429	11.5681

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk ukuran variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari 84 responden. Variabel kualitas LKPD terdiri dari 16 pernyataan yang diukur dengan skal *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran sesungguhnya) sebesar 42-80 dengan kisaran teoritisnya 16-80. Nilai *mean* sesungguhnya untuk variabel kualitas LKPD sebesar 64.08333. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas LKPD pemerintah daerah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan baik, yaitu rata-rata responden telah membuat laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Variabel penerapan SAKD terdiri dari 8 pernyataan yang diukur dengan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran sesungguhnya) sebesar 18-40 dengan kisaran teoritisnya 8-40. Nilai *mean* sesungguhnya untuk variabel penerapan SAKD sebesar 32.82143. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SAKD pemerintah daerah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir telah diterapkan dengan baik. Variabel penerapan SAP terdiri dari 31 pernyataan yang diukur dengan skal *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran sesungguhnya) sebesar 92-151 dengan kisaran teoritisnya 31-155. Nilai *mean* sesungguhnya untuk variabel penerapan SAP sebesar 130.8333. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP di kota Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir sangat baik dimana SKPD telah menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada.

Variabel kompetensi SDM terdiri dari 20 pernyataan yang diukur dengan skal *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran sesungguhnya) sebesar 65-100 dengan kisaran teoritisnya 20-100. Nilai *mean* sesungguhnya untuk variabel kompetensi SDM sebesar 86.41666. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM pemerintah daerah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir sangat baik. Variabel penerapan SPIP terdiri dari 22 pernyataan yang diukur dengan skal *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran sesungguhnya) sebesar 48-102 dengan kisaran teoritisnya 22-110. Nilai *mean* sesungguhnya untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 78.71429. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah daerah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir tinggi sudah dilakukan dengan baik.

Model Pengukuran Dengan Menggunakan *Outer Model*

Uji *convergent validity* menjelaskan bahwa dari uji *Outer Loading (Convergent Validity)* terdapat beberapa indikator yang tidak valid. Pada uji *Outer Loading (Convergent Validity)* akan dinyatakan valid bila nilai *loadingnya* berada di atas 0,50, terlihat pada Tabel 4.8 terdapat indikator yang tidak valid yaitu: LKPD2, LKPD7, LKPD10, LKPD15, SAKD7, PSAP1, PSAP2, PSAP3, PSAP4, PSAP5, PSAP7, PSAP11, PSAP16, PSAP20, PSAP27, SDM2, SDM12, SPIP7, SPIP10, SPIP19, SPIP21, SPIP22 dikarenakan nilainya berada dibawah 0,50. Indikator yang tidak valid dibuang dan di uji kembali hingga seluruh indikator valid semua.

Uji *discriminant validity* menunjukkan bahwa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten telah memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dibandingkan nilai *loading* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten masih memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya. Hasil *composite reliability* menunjukkan *Composite Reliability* dari blok indikator penelitian ini menunjukkan nilai yang memuaskan, yaitu diatas 0,7 sehingga model dianggap memenuhi kriteria *Composite Reliability* dan dapat diteliti lebih lanjut.

Model Struktural Dengan Menggunakan *Inner Model*

Koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir dapat dijelaskan oleh variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 65,3% sedangkan 34,7% dijelaskan oleh variable lain diluar yang diteliti. Dan variable sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir dapat dijelaskan oleh variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 34,6% sedangkan 65,4% dijelaskan oleh variable lain diluar yang diteliti.

Pengujian Hipotesis :

a) Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD

Hasil pengujian pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.3851 dengan t-statistik sebesar 6.4704. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan sistem pengendalian intern yang baik maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan, apabila semakin baik sistem pengendalian intern

maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan serta kualitas laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan dapat meningkatkan keyakinan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sukmaningrum (2011) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi LKPD pemerintah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang, dengan hasil sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijaksanaan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi LKPD. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ni Luh Nyoman (2014) dan Susilawati dan Riana (2013).

b) Pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas LKPD

Hasil pengujian pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.0957 dengan t-statistik sebesar 1.1895. Karena t-statistik < 1.99 mengindikasikan bahwa variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dari Mardiasmo (2004: 34) yang mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkannya.

c) Pengaruh penerapan SAKD terhadap penerapan SPIP

Hasil pengujian pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern pemerintah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.2143 dengan t-statistik sebesar 2.2828. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian internal akan optimal apabila di dukung oleh penerapan sistem akuntansi yang dijalankan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian Harken Drama (2014) menggambarkan bahwa responden pada SKPD Kota Solok sudah sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan SAKD berpengaruh dan mempengaruhi sistem pengendalian intern pada SKPD Kota Solok.

d) Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD

Hasil pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.2702 dengan t-statistik sebesar 4.5366. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian purwanti nugraheni (2008) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Laporan Keuangan setelah adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah akuntabel yaitu mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan laporan keuangan yang akuntabel, dan telah menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Nyoman (2014) dan Sudiarinati (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan SAP yang dilaksanakan, maka kualitas LKPD yang dihasilkan PPK cenderung semakin baik. Suatu pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

e) Pengaruh penerapan SAP terhadap penerapan SPIP

Hasil pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap sistem pengendalian intern pemerintah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.2424 dengan t-statistik sebesar 2.3428. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai skor rerata beberapa indikator SAP yang nilai reratanya tergolong sudah baik namun masih belum optimal. Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan SPI yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya penerapan pada standar akuntansi pemerintah, tentu juga harus didukung oleh sistem pengendalian intern didalam penyelenggaraan keuangan.

f) Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD

Hasil pengujian pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.2589 dengan t-statistik sebesar 3.5882. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Desi Sefri (2014) menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dalam dunia pemerintah, setiap bagian

dalam pemerintah harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi, dapat diartikan apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudiarianti (2015) yang mengungkapkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD.

g) Pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan SPIP

Hasil pengujian pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap sistem pengendalian intern pemerintah diperoleh koefisien inner weight sebesar 0.2638 dengan t-statistik sebesar 2.5302. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai skor rerata indikator kompetensi SDM yang nilai rerata nya tergolong sudah baik namun masih belum optimal. Kompetensi SDM yang kompeten dibutuhkan untuk menghasilkan pengendalian internal yang berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syarifudin (2014) yang menunjukkan bahwa hubungan kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penerapan SPIP. Artinya semakin tinggi variasi kompetensi SDM maka pengendalian internal pemerintah akan semakin efektif.

h) Pengaruh Penerapan SPIP pada hubungan penerapan SAKD dan kualitas LKPD.

Hasil pengujian pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menggunakan rumus sobel. Berdasarkan tabel 4.21 diketahui besarnya pengaruh tidak langsung penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0.0825 dengan t-statistik sebesar 2.1303. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Ini berarti bahwa semakin tingginya penerapan SAKD pada PPK SKPD pemerintah kota Pekanbaru, kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hilir dengan didukung oleh penerapan SPIP yang baik maka akan menghasilkan kualitas LKPD yang baik.

i) Pengaruh Penerapan SPIP pada hubungan penerapan SAP dan kualitas LKPD.

Hasil pengujian pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menggunakan rumus sobel. Berdasarkan tabel 4.22 diketahui besarnya pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0.09339 dengan t-statistik sebesar 2.1800. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Ini berarti bahwa semakin tingginya penerapan SAP pada PPK SKPD pemerintah kota Pekanbaru, kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hilir dengan didukung oleh penerapan SPIP yang baik maka akan menghasilkan kualitas LKPD yang baik.

j) Pengaruh Penerapan SPIP pada hubungan kompetensi SDM dan kualitas LKPD.

Hasil pengujian pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern menggunakan rumus sobel. Berdasarkan tabel 4.23 diketahui besarnya pengaruh tidak langsung Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0.10162 dengan t-statistik sebesar 2.3324. Karena t-statistik > 1.99 mengindikasikan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki PPK-SKPD melalui peningkatan penerapan SPIP ada kecenderungan berdampak pada meningkatnya kualitas LKPD Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan hilir. SDM yang memiliki kompetensi yang baik disamping dapat mempengaruhi kualitas LKPD secara langsung, juga dapat meningkatkan penerapan SPIP pada instansinya yang berimplikasi pula pada peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian terhadap hipotesis pertama berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian terhadap hipotesis 2a berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi, yang mana pada SKPD Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir belum

bisa memberikan informasi tentang laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pengujian terhadap hipotesis 2b berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Pengujian terhadap hipotesis 3a berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian terhadap hipotesis 3b berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian terhadap hipotesis 4a berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD. Pengujian terhadap hipotesis 4b berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Pengujian terhadap hipotesis lima berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Pengujian terhadap hipotesis enam berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengujian terhadap hipotesis tujuh berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah obyek penelitian, yaitu menambah beberapa daerah penelitian sehingga seluruh SKPD kabupaten dan kota yang ada di provinsi Riau bisa diteliti. Penelitian ini hanya mengambil 1 (satu) orang responden, yaitu hanya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden pada bagian keuangan. Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua

pertanyaan yang disediakan dan untuk mengurangi subjektivitas dari responden serta melihat konsistensi terhadap hasil jawaban jika dilakukan metode wawancara. Menambah jumlah variabel bebas lainnya yang diprediksi berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agami, A.M. 2006. *Reporting on internal control over financial reporting*. The CPA Journal, Vol 76, No. 11, pp. 32-34.
- Arens, A.A, Randal J, dan Beasley, M.S. 2012. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. 14th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Doyle, Weili Ge, Mc Vay (2007). *Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting*. The Accounting Review. Vol. 82, No. 5 pp. 1141–1170
- Drama, Harken, 2014. *Pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening (studi empiris pada SKPD Kota Solok)*. Jurnal Universitas Negeri Padang
- Fikri, M. Ali, 2015, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemrov. NTB)*, Jurnal, Universitas Mataram NTB.
- Ihsanti, Emilda, 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. Jurnal Universitas Negeri Padang
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: FE Universitas Siliwangi.
- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, P. dan Subaweh, I. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13. Hal 138-150

- Permadi, Angga Dwi, 2013. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat*. Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung.
- Rahayu, Liza, 2014. *Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Riau*. Jom Fekon Vol.1 Nomor. 2 Oktober 2014
- Sekaran, U. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Spencer, M. Lyle and Spencer, M. Signe (1993), *Competence at Work Modelas for Superior Performance*, John Wily & Son, Inc, New York, USA.
- Sudiarianti, Made, Ni, 2015. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. SNA 18.
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk penelitian*, Bandung : Alfabeta , cet ke-12, Hlm. 323 16
- Syarifudin, Akhmad. 2014. *pengaruh SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada pemkab kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnin, Volume, 14, No 02, bulan Desember 2014.
- Warisno, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Longkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- sZeyn, E., 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37
- Badan Kepegawaian Negara. 2003. *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.